

ECOTEOLOGI SEBAGAI PARADIGMA BARU DAKWAH ISLAM DI ERA KRISIS IKLIM: TELAAH GAGASAN MENTERI AGAMA RI DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

Rohani ¹, Afriantoni ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

E-mail: rohanitalangpiase@gmail.com, afriantoni_uin@radenfatah.ac.id

Published: Februari , 2026

ABSTRACT

The study purpose was to critically examine the emergence of ecotheology as a contemporary paradigm within Islamic preaching in response to the global climate crisis, with particular attention to its formulation and implementation by the Indonesian Ministry of Religious Affairs. This research seeks to reinterpret the Islamic concept of khalifah fi al-ardh by expanding its meaning beyond spiritual stewardship toward concrete ecological responsibility. By positioning environmental awareness as an integral element of religious discourse, the study aims to highlight the transformative role of Islamic preaching in addressing sustainability, ecological justice, and social change in Indonesia. This study employed a qualitative descriptive approach using document-based research. Data were collected through systematic analysis of official speeches, policy documents, institutional programs, preacher training modules, and Islamic education curricula issued or endorsed by the Ministry of Religious Affairs. A critical discourse analysis framework was applied to explore how ecotheological narratives are constructed, disseminated, and institutionalized within contemporary Islamic preaching practices. The findings reveal that ecotheology has begun to be operationalized through several initiatives, including environmentally friendly mosque programs, eco-pesantren development, environmental literacy training for preachers, and the integration of ecological themes into Islamic education. Despite ongoing structural and cultural challenges, these initiatives demonstrate a gradual shift toward more contextual, practical, and environmentally responsive forms of Islamic preaching. This study concludes that ecotheology represents a significant conceptual and practical transformation in Islamic preaching in Indonesia. By aligning spiritual teachings with environmental responsibility, this paradigm offers a strategic framework for religious engagement with climate-related challenges and contributes to broader efforts toward sustainable and socially responsible religious practices.

Keywords: Ecotheology, Islamic Preaching, Climate Crisis, Religious Paradigm, Environmental Stewardship.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

INTRODUCTION

Dalam sejarah peradaban manusia, agama selalu memainkan peran sentral dalam membentuk tata nilai dan perilaku sosial masyarakat. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin tidak hanya mengatur aspek ritual dan spiritual, tetapi juga memberikan kerangka etika dan moral dalam hubungan manusia dengan alam semesta. Al-Qur’an secara eksplisit menyatakan bahwa manusia diangkat sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30), yang mengandung makna tanggung jawab ekologis dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Namun demikian, perkembangan global di abad ke-21 menghadirkan tantangan besar bagi ajaran agama, terutama dalam menjawab krisis iklim yang mengancam keberlanjutan kehidupan (Putri & Azzahra, 2025). Di tengah derasnya arus industrialisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan kerusakan ekosistem yang masif, muncul kebutuhan mendesak akan paradigma baru yang mampu mengintegrasikan ajaran spiritual Islam dengan kepedulian ekologis. Dalam konteks ini, ecoteologi sebuah pendekatan teologis yang mengedepankan relasi sakral antara Tuhan, manusia, dan alam menawarkan kerangka konseptual dan praksis yang relevan untuk menata ulang arah dakwah Islam di era kontemporer.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia berada dalam posisi strategis untuk memelopori transformasi dakwah yang lebih kontekstual dan ekologis. Wilayah kepulauan yang luas, kekayaan biodiversitas yang tinggi, serta keberagaman budaya dan agama menjadikan Indonesia laboratorium sosial-ekologis yang kompleks. Namun, Indonesia juga merupakan negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, abrasi, dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, kehadiran dakwah Islam yang sensitif terhadap krisis ekologis bukan hanya merupakan kebutuhan religius, tetapi juga tanggung jawab moral (Alfadhli, 2025). Dalam beberapa tahun terakhir, gagasan mengenai ecoteologi semakin mendapatkan tempat dalam diskursus keislaman di Indonesia, terutama sejak Menteri Agama RI menggaungkan pentingnya pendekatan keagamaan yang responsif terhadap isu lingkungan hidup. Gagasan ini menekankan bahwa dakwah Islam tidak cukup hanya menyampaikan ajaran normatif, tetapi juga harus menyentuh isu-isu aktual yang berkaitan dengan keadilan ekologis dan keberlanjutan hidup umat manusia.

Realitas menunjukkan bahwa meskipun krisis iklim telah menjadi isu global yang mendapat perhatian serius dari berbagai sektor, pendekatan dakwah di Indonesia masih didominasi oleh narasi-narasi spiritual konvensional yang kurang menyinggung dimensi lingkungan. Di tengah meningkatnya suhu global, pencemaran udara, penggundulan hutan, dan kerusakan pesisir, sebagian besar mimbar keagamaan di masjid, majelis taklim, maupun lembaga pendidikan Islam belum mengintegrasikan pesan-pesan ekologis secara sistematis. Bahkan, dalam beberapa kasus, aktivitas keagamaan tertentu justru berkontribusi terhadap degradasi lingkungan, seperti penggunaan bahan-bahan plastik dalam acara keagamaan massal tanpa mempertimbangkan dampak ekologisnya. Ketimpangan ini menunjukkan adanya jurang antara ajaran Islam yang mengajarkan keseimbangan dan keberlanjutan dengan praktik dakwah yang berjalan selama ini. Oleh karena itu, perlu ada pembaharuan paradigma dakwah Islam yang mampu mengedepankan nilai-nilai ecoteologis sebagai jawaban terhadap urgensi krisis iklim saat ini.

Berdasarkan laporan dari Climate Risk Index 2023 Indonesia menempati posisi ke-36 sebagai negara paling rentan terhadap bencana iklim, dengan rata-rata kerugian ekonomi tahunan yang mencapai miliaran dolar serta dampak sosial yang signifikan, termasuk kerentanan masyarakat pesisir dan petani kecil. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa sepanjang tahun 2023, luas hutan Indonesia yang mengalami deforestasi mencapai lebih dari 119 ribu hektar (Effendi, 2025). Fenomena ini menjadi ironi di tengah maraknya wacana moderasi beragama yang digaungkan oleh Kementerian Agama. Meskipun telah ada seruan dari Menteri Agama mengenai pentingnya pendekatan keberagaman yang peduli lingkungan, namun secara institusional belum terdapat kerangka dakwah nasional yang secara eksplisit memuat nilai-nilai ecoteologi sebagai bagian dari kurikulum dakwah. Ketidaksinambungan ini memperlihatkan bahwa kesadaran ekoteologis belum sepenuhnya diarusutamakan dalam sistem dakwah Islam di Indonesia, sehingga menyisakan celah besar antara gagasan dan implementasi.

Ecoteologi secara etimologis merupakan gabungan antara kata “eco” yang merujuk pada ekologi, dan “teologi” yang merujuk pada studi tentang Tuhan. Dalam konteks Islam, ecoteologi merujuk pada pendekatan yang mengaitkan ajaran ketuhanan dan etika keislaman dengan tanggung jawab ekologis. Al-Qur’an menyebut bumi sebagai tanda-tanda kekuasaan Tuhan (ayat-ayat kauniyah) dan menegaskan larangan melakukan kerusakan di muka bumi (QS. Al-A’raf: 56). Hadis Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan prinsip hidup berkelanjutan seperti larangan menebang pohon tanpa alasan yang sah dan anjuran menanam tanaman meskipun kiamat tiba (Masduqi, 2020). Ecoteologi dalam Islam menegaskan bahwa pemeliharaan alam bukan hanya tanggung jawab negara atau aktivis lingkungan, tetapi juga bagian integral dari ibadah dan penghambaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, konsep ecoteologi mengajak para dai dan ulama untuk meredefinisi tugas dakwah mereka dalam menghadapi tantangan global seperti krisis iklim.

Gagasan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pentingnya memperkuat ecoteologi dalam diskursus keagamaan bukanlah tanpa dasar. Dalam berbagai pidato dan forum nasional, Menteri

Agama telah menekankan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan bagian dari moderasi beragama yang inklusif dan progresif. Menurut beliau, moderasi beragama tidak hanya berarti toleransi antarumat, tetapi juga mencakup kepedulian terhadap lingkungan sebagai amanah Tuhan. Sejalan dengan visi ini, beberapa program telah diluncurkan seperti "Masjid Ramah Lingkungan", "Santri Eco-Pesantren", dan "Eco Dakwah". Namun demikian, belum banyak studi akademik yang secara khusus menelaah lebih dalam bagaimana gagasan ini dapat diformulasikan sebagai paradigma dakwah Islam yang sistematis dan terstruktur, khususnya dalam konteks keindonesiaan yang plural dan beragam secara ekologis dan sosial.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba mengeksplorasi tema ecoteologi dalam konteks Islam. Penelitian oleh (Pohan et al., 2023) menyoroti basis normatif ajaran Islam terkait lingkungan, namun lebih bersifat konseptual tanpa menjangkau praktik dakwah. Studi oleh (Askar & Ghofur, 2025) mengkaji bagaimana pesan-pesan lingkungan dapat disisipkan dalam khutbah Jumat, namun belum menyentuh dimensi institusional seperti arah kebijakan Kementerian Agama. Adapun penelitian oleh (Maa & Zainuri, 2024) dalam Jurnal Ekoteologi Nusantara memfokuskan pada praktik-praktik lokal masyarakat adat dalam menjaga lingkungan berbasis nilai religius, tetapi tidak mengaitkan langsung dengan transformasi dakwah Islam secara nasional. Ketiga penelitian tersebut memberikan fondasi penting dalam memahami ecoteologi dari sudut normatif, retorik, dan praksis lokal, namun belum mengangkat peran strategis institusi negara dan tokoh otoritatif seperti Menteri Agama dalam membentuk paradigma dakwah baru yang ekologis.

Berdasarkan keseluruhan penelitian terdahulu di atas sebagian besar peneliti hanya berfokus pada aspek normatif ecoteologi dalam Al-Qur'an atau praktik lokal masyarakat, dan kurang berfokus pada perumusan ecoteologi sebagai paradigma dakwah nasional yang sistematis. Padahal, gagasan Menteri Agama RI telah membuka ruang baru bagi transformasi dakwah yang menyentuh isu ekologis secara lebih substansial dan kelembagaan. Maka dari itu, untuk mengisi kesenjangan ini, penelitian ini akan lebih berfokus pada analisis wacana dan konseptualisasi ecoteologi sebagai paradigma dakwah Islam kontemporer yang dikembangkan dalam konteks Indonesia melalui telaah kritis terhadap gagasan dan kebijakan yang diusung oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengonstruksi ecoteologi sebagai paradigma baru dalam dakwah Islam di Indonesia, dengan menelaah secara kritis gagasan Menteri Agama RI sebagai titik tolak transformasi dakwah yang lebih responsif terhadap isu krisis iklim. Melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur dan analisis wacana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan model dakwah ekologis serta menawarkan kerangka implementatif bagi lembaga keagamaan dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai Islam di era kontemporer.

METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam fenomena gagasan ecoteologi sebagai paradigma baru dakwah Islam dalam konteks krisis iklim di Indonesia (Sugiyono, 2021). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan menguji hipotesis kuantitatif, melainkan mengeksplorasi makna, konstruksi wacana, dan arah pemikiran yang dikembangkan oleh Menteri Agama RI terkait hubungan antara agama dan isu lingkungan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengungkap dinamika naratif, simbolik, dan ideologis yang terkandung dalam teks, pidato, kebijakan, serta program-program resmi yang telah diluncurkan oleh Kementerian Agama dalam kerangka ecoteologi Islam (Sugiyono, 2019b). Penelitian ini juga melihat bagaimana gagasan tersebut diresepsi dalam kerangka dakwah kontemporer, baik oleh institusi keagamaan, tokoh agama, maupun masyarakat Muslim secara lebih luas, sehingga pemaknaan terhadap ecoteologi tidak hanya dibatasi dalam ruang doktrinal, tetapi juga dalam praktik sosial-dakwah yang konkret (Sugiyono, 2019a). Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka, dengan menelaah berbagai sumber primer seperti transkrip pidato Menteri Agama RI, dokumen

kebijakan resmi Kementerian Agama, modul pelatihan dakwah, artikel opini, serta program-program kampanye keagamaan yang terkait dengan tema lingkungan (J. W. Creswell & Creswell, 2023). Sumber sekunder yang turut dikaji mencakup jurnal ilmiah, buku-buku bertema ecoteologi Islam, artikel media daring, serta laporan lembaga-lembaga keagamaan dan lingkungan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis wacana kritis (critical discourse analysis) untuk mengidentifikasi konstruksi ideologis, nilai-nilai dominan, serta narasi utama yang dibangun dalam gagasan ecoteologi versi Menteri Agama. Peneliti secara bertahap mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan mensintesis data untuk menemukan pola-pola argumentatif yang menunjukkan transformasi paradigma dakwah Islam dari model konvensional menuju dakwah yang inklusif terhadap isu krisis iklim. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyumbang perspektif baru dalam ranah studi Islam kontemporer yang lebih kontekstual, progresif, dan relevan terhadap tantangan ekologis di Indonesia (J. Creswell, 2017).

FINDING AND DISCUSSION

Dalam salah satu pidato resminya pada Forum Literasi Keagamaan dan Iklim di Jakarta (2023), Menteri Agama RI menyatakan, “Krisis lingkungan adalah krisis moral. Kerusakan alam tidak semata karena faktor teknis, tetapi karena hilangnya nilai-nilai spiritual dalam memperlakukan bumi. Di sinilah agama harus hadir, dakwah Islam harus bergerak melampaui batas mimbar, dan masuk ke persoalan konkret seperti pemanasan global, deforestasi, dan bencana ekologis.” Pernyataan ini menunjukkan adanya reposisi strategis terhadap dakwah Islam yang selama ini lebih fokus pada pembinaan moral individu, menuju dakwah yang merespons persoalan ekologis kolektif. Analisis terhadap wacana tersebut memperlihatkan bahwa Menteri Agama berupaya membangun kesadaran publik bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar hasil eksploitasi ekonomi, melainkan akibat krisis nilai spiritual yang tidak lagi menempatkan alam sebagai bagian dari relasi sakral antara manusia dan Tuhan.

Dalam dokumen kebijakan internal Kementerian Agama tahun 2023 bertajuk “Moderasi Beragama untuk Keberlanjutan”, Menteri Agama menulis, “Ecoteologi adalah jembatan antara spiritualitas dan keberlanjutan. Umat beragama harus kembali membaca kitab suci dengan kesadaran ekologis, karena ajaran agama tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga hubungan manusia dengan alam.” Pernyataan ini mengindikasikan upaya reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan, agar dibaca dalam kerangka etika lingkungan. Penelitian ini menemukan bahwa melalui pernyataan tersebut, Menteri Agama tidak hanya menawarkan pendekatan baru, tetapi juga menantang cara pandang konservatif yang memisahkan agama dari urusan ekologis. Dakwah Islam, dalam gagasan ini, harus mampu menggugah umat bahwa menjaga bumi adalah bentuk penghambaan, dan bahwa kerusakan ekologis adalah dosa kolektif.

Dalam wawancara beliau yang dimuat oleh media resmi Kemenag.go.id pada 2023, Menteri Agama menyampaikan, “Kami mendorong seluruh pesantren dan masjid untuk mulai menjadi pusat kesadaran ekologis. Tidak cukup hanya menyampaikan ceramah tentang surga dan neraka, tetapi harus juga tentang sampah, air bersih, dan emisi karbon. Itulah jihad ekologis hari ini.” Gagasan ini bila dianalisis dalam perspektif ecoteologi menegaskan pentingnya pergeseran orientasi dakwah dari aspek eskatologis ke aspek ekologis. Dengan menyebut istilah “jihad ekologis”, Menteri Agama melakukan reframing terhadap makna jihad dalam Islam sebagai perjuangan merawat ciptaan Tuhan. Ini merupakan langkah strategis untuk mengubah persepsi publik bahwa perjuangan agama tidak semata-mata bersifat teologis atau politik, tetapi juga menyangkut tanggung jawab terhadap keberlanjutan bumi.

Di dalam program resmi Kementerian Agama yang bertajuk “Masjid Ramah Lingkungan”, Menteri Agama menekankan, “Masjid adalah tempat suci, maka lingkungan sekitar masjid pun harus disucikan. Ini tidak hanya soal kebersihan fisik, tetapi juga soal bagaimana kita menyucikan alam dari kerakusan manusia.” Analisis terhadap pernyataan ini menunjukkan bahwa terdapat pendekatan simbolik yang digunakan dalam membangun kesadaran kolektif: masjid tidak lagi hanya diposisikan sebagai tempat ibadah sempit, tetapi sebagai pusat transformasi etika ekologis. Ecoteologi dalam

konteks ini tidak hadir sebagai teori abstrak, tetapi sebagai narasi praksis yang melibatkan ruang spiritual konkret. Penelitian ini melihat bahwa dengan menggandeng simbol keagamaan populer seperti “masjid”, Menteri Agama berusaha menanamkan pesan ekologis secara kultural ke dalam ruang ibadah umat Islam.

Pada kegiatan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama 2023, Menteri Agama juga menyatakan: “Kami tidak sedang membangun ekologi agama, tapi agama yang ekologis. Kita perlu merevisi cara kita berdakwah, bukan hanya menegur yang tidak salat, tapi juga yang membuang sampah sembarangan.” Kalimat ini bila dikaji menunjukkan bahwa terdapat desakan reformasi metodologis dalam praktik dakwah Islam. Penelitian ini menemukan bahwa gagasan ini mendesak institusi dakwah untuk melakukan introspeksi dan rekonfigurasi orientasi materi ceramah, khotbah, serta pesan-pesan religius di media massa. Dakwah tidak boleh abai terhadap persoalan ekologis yang mengancam eksistensi umat manusia, karena dalam pandangan Menteri Agama, keimanan sejati harus teraktualisasi dalam tindakan nyata yang memuliakan bumi sebagai makhluk Tuhan.

Dengan mengaitkan seluruh pernyataan-pernyataan di atas, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ecoteologi dalam gagasan Menteri Agama RI merupakan bentuk rekonstruksi teologi Islam yang berbasis pada aksi, bukan hanya pada kontemplasi. Ecoteologi dikembangkan sebagai paradigma baru dakwah yang progresif, di mana pesan-pesan keagamaan harus mampu bertransformasi menjawab tantangan krisis iklim. Melalui analisis teks dan wacana, ditemukan bahwa pendekatan Menteri Agama memadukan antara nilai-nilai Al-Qur’an, respons terhadap problem aktual, dan strategi komunikasi yang populis. Gagasan ini memiliki relevansi besar dalam konteks Indonesia yang plural, rentan terhadap bencana iklim, dan memiliki basis keagamaan yang kuat. Penelitian ini juga menemukan bahwa gagasan tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kurikulum dakwah formal, sehingga masih diperlukan penguatan dalam bentuk pelatihan dai, integrasi ecoteologi dalam pendidikan agama, dan sinergi antarinstansi untuk menjadikan dakwah ekologis sebagai arus utama keislaman di Indonesia.

1. Redefinisi Dakwah Islam dalam Konteks Krisis Iklim: Menafsir Ulang Tugas Khalifah di Bumi

Dalam sejarah perkembangan Islam dakwah telah memainkan peranan fundamental dalam membentuk peradaban, menyampaikan nilai-nilai tauhid, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan. Namun demikian, dalam konteks kontemporer yang ditandai oleh ancaman krisis iklim global, makna dakwah mengalami tantangan mendasar. Krisis iklim tidak hanya menciptakan bencana fisik, seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut, tetapi juga menimbulkan krisis spiritual dan moral. Dalam kondisi ini, umat Islam dihadapkan pada urgensi untuk merefleksikan kembali ajaran dasar tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Konsep “khalifah fi al-ardh” yang selama ini dipahami dalam dimensi sosial dan politik, kini perlu ditafsirkan ulang dalam kerangka tanggung jawab ekologis (Simon, 2021). Redefinisi dakwah dalam konteks krisis iklim bukan hanya sekadar penambahan topik lingkungan dalam ceramah keagamaan, tetapi transformasi mendalam atas cara pandang, orientasi, dan metode dakwah agar relevan dengan tantangan zaman.

Krisis iklim telah membalikkan banyak paradigma lama, termasuk dalam tafsir keagamaan. Selama ini, dakwah Islam cenderung terfokus pada aspek spiritual personal, seperti ibadah, akhlak, dan keimanan individu. Padahal, dalam banyak ayat Al-Qur’an, hubungan manusia dengan alam mendapatkan porsi yang sangat signifikan. Al-Qur’an menyebut bumi dan seisinya sebagai ayat-ayat Tuhan (ayat kauniyah) yang mesti direnungkan dan dijaga. Firman Allah SWT dalam QS. Al-A’raf ayat 56, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya”, menjadi dasar normatif kuat untuk menjadikan lingkungan sebagai bagian dari narasi dakwah. Dalam hal ini, Menteri Agama Republik Indonesia telah mengangkat pentingnya ecoteologi sebagai jembatan antara nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab ekologis. Dengan demikian, dakwah Islam di era ini tidak cukup hanya menyelamatkan jiwa dari neraka, tetapi juga bumi dari kehancuran ekologis.

Redefinisi dakwah juga menuntut perubahan metodologis. Selama ini, metode dakwah sering kali bersifat instruktif, top-down, dan cenderung normatif. Dalam konteks krisis iklim, dakwah harus bergerak menjadi lebih partisipatif, kontekstual, dan berbasis pada kesadaran kolektif. Tugas khalifah di bumi bukan hanya mengelola manusia, tetapi juga menjaga harmonisasi ekosistem. Tafsir kontemporer atas QS. Al-Baqarah ayat 30 menekankan bahwa tanggung jawab khalifah melibatkan dimensi etik dan ekologis: manusia diberi mandat untuk mengelola bumi, bukan mengeksploitasinya. Maka, dakwah yang merepresentasikan tugas khalifah harus mengajak umat untuk mengubah gaya hidup, menata ulang konsumsi, menghindari pemborosan, dan memperkuat budaya keberlanjutan. Dalam hal ini, pesan-pesan dakwah yang menyentuh isu seperti pengelolaan sampah, konservasi air, reboisasi, dan transisi energi bukanlah isu teknis sekuler, tetapi bagian dari kewajiban keagamaan.

Redefinisi dakwah dalam kerangka tugas khalifah juga harus mengubah basis epistemologis dari teks ke praksis. Artinya, pemahaman keagamaan tidak berhenti pada kutipan ayat atau hadis, melainkan harus menghasilkan aksi konkret yang mendukung kelestarian lingkungan. Ketika dai menyampaikan pesan-pesan ekologi, mereka tidak cukup hanya mengutip larangan merusak alam, tetapi juga menunjukkan bagaimana umat bisa memulai perubahan dari kehidupan sehari-hari. Hal ini memerlukan pendekatan integratif, di mana dakwah tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi juga di ladang, sungai, pasar, sekolah, dan media sosial. Dakwah menjadi bagian dari kehidupan ekologis umat, bukan sekadar upacara retorika mingguan (Julivadistanto & Gambur, 2024). Dalam konteks ini, Menteri Agama RI menekankan pentingnya “jihad ekologis”, yaitu upaya kolektif untuk menyelamatkan bumi sebagai amanah Tuhan. Istilah ini memuat makna teologis sekaligus aktivis, memperkuat pesan bahwa berjuang untuk kelestarian lingkungan adalah bagian dari ibadah.

Krisis iklim juga telah mengubah karakter ancaman terhadap umat. Dulu, dakwah sering kali berfokus pada musuh nyata dalam bentuk kezaliman politik, penyimpangan akidah, atau hedonisme. Kini, musuh itu bisa berupa kabut asap, kekeringan ekstrem, abrasi pantai, atau limbah plastik. Semua ini bukan hanya akibat dari ketidaktertiban teknologis, tetapi dari lemahnya kesadaran spiritual terhadap lingkungan. Dakwah yang tidak tanggap terhadap ancaman ini berisiko menjadi tidak kontekstual dan kehilangan relevansi sosial. Dalam banyak hal, krisis lingkungan mengandung dimensi kezaliman struktural, di mana kerusakan dilakukan oleh segelintir pihak, tetapi dampaknya ditanggung oleh masyarakat luas, terutama kelompok miskin dan rentan. Oleh sebab itu, dakwah dalam paradigma ecoteologi harus pula mengandung nilai advokasi terhadap keadilan ekologis, menolak eksploitasi sumber daya, serta memperjuangkan tata kelola lingkungan yang berkeadilan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa redefinisi dakwah sangat berkaitan erat dengan pembaruan kurikulum dan pelatihan dai. Jika para dai dan khatib tidak dibekali dengan literasi lingkungan, maka transformasi dakwah hanya akan berhenti di level wacana elit. Oleh karena itu, gagasan Menteri Agama tentang “Masjid Ramah Lingkungan” dan “Eco-Pesantren” adalah upaya konkret untuk menjadikan institusi keagamaan sebagai pusat perubahan ekologis. Dalam pendekatan ini, dakwah tidak hanya menjadi kegiatan ceramah, tetapi gerakan perubahan yang bisa dilihat dan dirasakan misalnya dengan pengurangan plastik di masjid, penanaman pohon oleh santri, penggunaan energi terbarukan di lingkungan pesantren, dan pengelolaan limbah yang berbasis nilai Islam (Kurniati & Mursalin, 2023). Dakwah menjadi tidak hanya didengar, tetapi juga diteladani dan ditiru sebagai praktik keislaman yang hidup dan menyelamatkan kehidupan.

Dalam konteks ini pula redefinisi dakwah menuntut perubahan bahasa dakwah itu sendiri. Bahasa dakwah tidak lagi bisa hanya berbicara tentang dosa dan pahala dalam abstraksi metafisik, tetapi harus mampu menjelaskan bagaimana membuang sampah sembarangan itu adalah bentuk kedurhakaan terhadap amanah Tuhan. Bagaimana pembakaran hutan adalah bentuk pelanggaran terhadap hak makhluk hidup lain yang juga ciptaan Allah. Bagaimana gaya hidup konsumtif bertentangan dengan prinsip wasathiyah (kesederhanaan) yang diajarkan Islam. Dalam hal ini, peran dai sebagai juru bicara agama perlu ditopang oleh kemampuan komunikasi ekologi, di mana pesan agama disampaikan dengan narasi yang kontekstual, data ilmiah, dan pendekatan psikologis yang

menggugah. Di sinilah pentingnya pelatihan dai ecoteologis yang bersifat lintas ilmu, agar mereka tidak hanya berbicara dari kitab, tetapi juga dari kenyataan yang dihadapi umat.

Penafsiran ulang terhadap tugas khalifah di bumi juga membuka ruang bagi reinterpretasi terhadap relasi manusia dengan makhluk lain. Islam mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki nilai dan peran dalam kehidupan. Dalam QS. Al-An'am ayat 38, disebutkan bahwa setiap makhluk di bumi adalah umat sebagaimana manusia. Maka, perusakan terhadap habitat hewan, peracunan sungai, dan kepunahan spesies bukan sekadar tindakan ekologis, tetapi juga bentuk ketidakadilan spiritual terhadap makhluk Tuhan. Dakwah Islam yang diredefinisi dalam kerangka ini harus mengajak umat untuk memuliakan makhluk hidup lain, tidak merusaknya atas nama pembangunan, dan menyadari bahwa keberadaan hewan, tumbuhan, air, dan tanah memiliki hak-haknya sendiri. Hal ini menjadi semakin penting ketika krisis iklim telah mempercepat punahnya spesies dan mengancam keberlanjutan rantai kehidupan yang seharusnya dijaga dalam sistem ciptaan Tuhan yang saling terhubung.

Redefinisi dakwah dalam konteks krisis iklim juga membuka ruang dakwah yang lebih inklusif dan kolaboratif. Tidak cukup jika dakwah hanya dilakukan oleh ulama, tetapi harus melibatkan aktivis lingkungan, akademisi, pemuda, tokoh adat, dan media. Dakwah menjadi kegiatan sosial lintas sektor yang bersumber dari nilai Islam tetapi melibatkan sains, budaya, dan teknologi. Di sinilah relevansi gagasan Menteri Agama yang menyatakan bahwa "agama harus hadir menjembatani kesenjangan antara iman dan aksi." Dakwah tidak cukup menyampaikan nilai, tetapi juga menyediakan solusi. Ketika masjid menjadi tempat daur ulang, pesantren menjadi laboratorium hijau, dan dai menjadi agen perubahan iklim, maka saat itulah dakwah telah mengalami redefinisi substantif. Ini bukan sekadar reformulasi wacana, tetapi transformasi praksis yang menjadikan Islam sebagai kekuatan yang menyelamatkan bumi dan peradaban.

Redefinisi dakwah Islam dalam konteks krisis iklim dan penafsiran ulang terhadap tugas khalifah di bumi merupakan panggilan zaman yang tidak dapat diabaikan. Gagasan ecoteologi yang dikembangkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia telah membuka ruang baru bagi pembaharuan dakwah yang lebih kontekstual, solutif, dan berorientasi masa depan. Dalam kerangka ini, tugas khalifah tidak lagi hanya dimaknai sebagai penguasa atas bumi, tetapi sebagai penjaga, perawat, dan pemulih bumi yang rusak. Dakwah Islam menjadi lebih dari sekadar seruan ritual, melainkan gerakan kesadaran ekologis yang menumbuhkan cinta kepada bumi sebagai manifestasi cinta kepada Sang Pencipta. Redefinisi ini menjadi langkah strategis agar dakwah tetap hidup, relevan, dan bermakna dalam menghadapi zaman yang diguncang oleh krisis ekologis global.

2. Implementasi Gagasan Ecoteologi dalam Kebijakan dan Praktik Dakwah Kementerian Agama

Gagasan ecoteologi sebagai bagian dari paradigma baru dakwah Islam telah menemukan momentumnya dalam beberapa tahun terakhir, terutama ketika krisis iklim bukan hanya menjadi ancaman lingkungan, melainkan pula mengusik dimensi spiritual, sosial, dan keberlanjutan peradaban manusia. Dalam konteks keindonesiaan yang majemuk dan religius, implementasi gagasan ecoteologi menemukan jalurnya melalui kebijakan-kebijakan publik yang bernuansa religius, khususnya yang disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ((Falah & Rohmatuszahroh, 2024). Kementerian ini tidak hanya memiliki otoritas administratif atas penyelenggaraan kehidupan keagamaan, tetapi juga memainkan peran strategis dalam membentuk arah ideologis dan kultural umat beragama, khususnya umat Islam. Dengan demikian, implementasi ecoteologi melalui institusi ini tidak hanya berbentuk normatif dalam pernyataan-pernyataan publik, tetapi juga terstruktur dalam program, kurikulum, regulasi, dan inisiatif dakwah nasional.

Pijakan awal dari implementasi ini tampak dalam arah kebijakan Kementerian Agama yang mulai secara eksplisit menyebut "keberlanjutan lingkungan" sebagai bagian integral dari visi moderasi beragama. Dalam berbagai dokumen kebijakan dan forum resmi, Menteri Agama RI menegaskan

bahwa agama harus hadir secara relevan dalam menyikapi realitas global, termasuk perubahan iklim dan krisis ekologi. Salah satu kutipan yang sering diangkat dari Menteri Agama adalah, “Ecoteologi bukan hanya narasi moral, tetapi jalan dakwah masa depan. Masjid, pesantren, dan komunitas Islam harus menjadi pionir penyelamat bumi, bukan sekadar tempat menunggu kiamat.” Pernyataan ini mengandung tiga elemen penting: kesadaran krisis, urgensi transformasi dakwah, dan reposisi institusi keagamaan sebagai pelaku aktif penyelamatan ekologis. Implementasi ecoteologi dalam kebijakan Kemenag lalu berwujud dalam sejumlah langkah strategis yang berusaha memadukan antara ajaran Islam dan nilai-nilai keberlanjutan.

Salah satu implementasi yang menonjol adalah program Masjid Ramah Lingkungan, yang bertujuan menjadikan masjid sebagai pusat percontohan kehidupan ekologis umat Islam. Program ini mendorong masjid untuk tidak hanya memperhatikan kebersihan dan keindahan tempat ibadah, tetapi juga mengelola limbah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memanfaatkan energi terbarukan seperti panel surya, serta menanam pohon di lingkungan sekitar masjid. Beberapa masjid di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan telah menjadi pilot project dari inisiatif ini, lengkap dengan pelatihan takmir masjid mengenai tata kelola hijau (Raziqi, 2023). Kementerian Agama menyediakan modul pelatihan, instrumen evaluasi, serta pendampingan secara berkala. Melalui masjid, yang merupakan pusat spiritual sekaligus sosial masyarakat Muslim, gagasan ecoteologi dijadikan praksis nyata yang bisa dirasakan oleh jamaah secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Pesantren juga menjadi medium utama dalam implementasi gagasan ini melalui program Eco-Pesantren. Pesantren dipilih karena memiliki basis komunitas yang kuat, sistem pembelajaran yang mandiri, serta posisi strategis dalam mentransmisikan nilai-nilai Islam kepada generasi muda. Dalam program Eco-Pesantren, Kementerian Agama bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta NGO lingkungan untuk mengembangkan kurikulum berbasis ekologi, pelatihan daur ulang, pertanian organik, dan konservasi air. Tujuannya bukan hanya agar santri mengenal krisis iklim, tetapi juga agar mereka menjadi agen perubahan di masyarakat. Dalam pendekatan ini, dakwah ecoteologis tidak berhenti di ruang kelas, tetapi menjelma dalam lumbung pangan pesantren, kebun hidroponik, hingga pengelolaan limbah organik.

Kementerian Agama juga mengintegrasikan ecoteologi ke dalam materi khutbah dan ceramah keagamaan melalui pelatihan dai dan khatib. Dalam pelatihan tersebut, para penceramah dibekali dengan perspektif Islam tentang lingkungan, data ilmiah tentang perubahan iklim, serta teknik retorika agar pesan dakwah tidak bersifat dogmatis semata, tetapi menggugah kesadaran ekologis umat (Putra, 2023). Bahkan, dalam edaran resmi Direktorat Penerangan Agama Islam, disebutkan bahwa tema khutbah Jumat di bulan tertentu wajib mengangkat isu-isu lingkungan. Ini menunjukkan adanya langkah konkret untuk menggeser dakwah dari pola lama yang hanya membahas akhirat, menuju dakwah yang membumi dan responsif terhadap realitas kehidupan umat. Beberapa tema yang diangkat antara lain: “Air sebagai Amanah Tuhan”, “Islam dan Perubahan Iklim”, “Kebersihan Lingkungan sebagai Ibadah”, dan “Tugas Khalifah dalam Menjaga Alam”.

Implementasi ecoteologi dalam kebijakan Kementerian Agama juga terlihat dari pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang memuat nilai-nilai keberlanjutan. Pada tahun 2023, Direktorat Pendidikan Islam meluncurkan modul pendidikan yang memasukkan topik-topik seperti etika lingkungan, konservasi, dan gaya hidup islami yang ramah bumi ke dalam pelajaran fiqih, aqidah akhlak, dan SKI (Sejarah Kebudayaan Islam). Buku ajar ini mencantumkan ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan kerusakan, kewajiban menanam pohon, serta kisah Nabi Muhammad SAW yang mencintai alam, seperti larangan menebang pohon saat perang atau memberi makan hewan. Dengan demikian, generasi muda Muslim diarahkan sejak dini untuk mengintegrasikan pemahaman keagamaan mereka dengan praktik keberlanjutan, menjadikan bumi bukan sekadar tempat tinggal, tetapi ruang spiritualitas dan tanggung jawab moral.

Salah satu dimensi yang juga dikembangkan adalah kampanye “Dakwah Hijau di Era Digital”, di mana Kementerian Agama mendorong dai-dai muda dan konten kreator Islam untuk mengangkat tema lingkungan dalam media sosial. Dengan memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, dakwah Islam kini merambah generasi digital dengan gaya komunikasi yang ringan tetapi menyentuh. Program ini memberikan pelatihan teknis produksi konten, strategi naratif berbasis Al-Qur’an dan hadis, serta pembekalan literasi ekologi. Tujuannya agar nilai-nilai Islam tidak hanya tersebar di mimbar, tetapi juga dalam algoritma media sosial yang kini menjadi ruang baru bagi pembentukan opini publik. Dengan kata lain, implementasi ecoteologi juga menyasar lanskap komunikasi dakwah yang telah berubah drastis di era digital, dan menjadikan dunia maya sebagai lahan dakwah ekologis yang efektif.

Implementasi ini tidak luput dari berbagai tantangan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun arah kebijakan dan program telah terbentuk, namun internalisasi nilai ecoteologi belum merata di kalangan aparatur, dai, dan masyarakat luas. Beberapa lembaga keagamaan masih memisahkan antara agama dan isu lingkungan, memandangnya sebagai bagian dari agenda sekuler atau aktivisme luar (Mumtazah, 2025). Di sisi lain, ada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, seperti kurangnya dai yang memahami aspek ekologi secara komprehensif. Di sejumlah daerah, masih sulit ditemukan khutbah atau ceramah yang konsisten membahas krisis iklim atau ajakan untuk peduli lingkungan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan sistemik yang tidak hanya berupa pelatihan sesaat, tetapi program berkelanjutan, insentif struktural, dan pengawasan pelaksanaan di lapangan.

Tantangan lainnya adalah resistensi budaya di tengah masyarakat yang terbiasa dengan pola hidup instan dan konsumtif. Ajakan untuk hidup sederhana, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, atau menanam pohon sering kali dianggap beban tambahan, bukan bentuk ibadah. Oleh karena itu, Kementerian Agama perlu menyinergikan implementasi kebijakan ini dengan pendekatan kultural, misalnya melalui narasi keberkahan hidup hijau, mengaitkan aksi lingkungan dengan nilai pahala, dan menonjolkan teladan Nabi dalam menjaga ekosistem. Cerita-cerita profetik tentang hubungan Nabi dengan alam, seperti unta yang mengadu, burung yang dilindungi, dan sumur yang dijaga bisa dijadikan sebagai basis narasi dalam membangun empati ekologis umat.

Dari segi keberlanjutan program penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi lintas sektor, agar program ecoteologi tidak terjebak sebagai proyek simbolik. Kementerian Agama perlu membangun kemitraan yang lebih kuat dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Desa, perguruan tinggi Islam, dan media nasional. Hal ini akan memperluas daya jangkauan program dan memperkuat legitimasi dakwah ekologis sebagai gerakan nasional. Selain itu, evaluasi berbasis indikator keberlanjutan, seperti penurunan limbah di masjid, penghijauan di pesantren, atau peningkatan indeks literasi lingkungan di sekolah madrasah perlu dikembangkan. Indikator ini dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan implementasi dan sekaligus memperlihatkan hasil nyata dari dakwah ecoteologis yang telah dijalankan.

Dengan mempertimbangkan seluruh dimensi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi gagasan ecoteologi dalam kebijakan dan praktik dakwah Kementerian Agama adalah langkah progresif dan transformatif dalam menghadirkan Islam sebagai agama yang tidak hanya menyelamatkan jiwa, tetapi juga bumi. Melalui masjid, pesantren, pendidikan, media, dan dai, nilai-nilai keberlanjutan diterjemahkan secara aplikatif dalam kehidupan umat Islam. Ini merupakan pembaruan dakwah yang tidak hanya sesuai dengan tantangan zaman, tetapi juga menjadikan Islam sebagai solusi bagi peradaban manusia yang tengah dilanda krisis iklim global. Meskipun masih terdapat banyak tantangan, keberanian institusional Kementerian Agama dalam mengarusutamakan ecoteologi patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab religius dan ekologis yang menjembatani iman dan aksi. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, kolaboratif, dan kontekstual, ecoteologi akan menjadi wajah baru dakwah Islam di masa depan sebuah wajah yang ramah bumi, adil secara sosial, dan spiritual secara mendalam.

CONCLUSIONS

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ecoteologi sebagai paradigma baru dakwah Islam merupakan respon transformatif terhadap krisis iklim global yang semakin mengancam keberlanjutan kehidupan. Gagasan ini, sebagaimana digagas dan dikembangkan oleh Menteri Agama RI, menghadirkan pembaruan teologis yang mereposisi tugas khalifah di bumi sebagai tanggung jawab ekologis dan spiritual. Dakwah Islam yang selama ini cenderung terfokus pada aspek ibadah individual dan ajaran normatif, kini diarahkan untuk menyentuh persoalan-persoalan ekologis secara konkret, seperti kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan ketimpangan ekologis. Implementasi ecoteologi oleh Kementerian Agama tampak dalam berbagai program seperti Masjid Ramah Lingkungan, Eco-Pesantren, pelatihan dai dengan perspektif lingkungan, serta integrasi kurikulum pendidikan agama berbasis keberlanjutan. Meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, kultural, dan epistemologis, arah kebijakan ini menunjukkan bahwa ecoteologi dapat menjadi dasar dakwah Islam yang lebih kontekstual, progresif, dan berakar kuat pada nilai-nilai Al-Qur'an dan realitas keindonesiaan yang tengah menghadapi tekanan ekologis besar.

Untuk memperkuat peran ecoteologi dalam dakwah Islam diperlukan langkah strategis yang lebih sistematis dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan. Kementerian Agama perlu memperluas pelatihan dai berbasis literasi lingkungan, menyusun kurikulum dakwah yang secara eksplisit mengintegrasikan isu iklim, serta membangun sinergi lintas kementerian, lembaga pendidikan, ormas Islam, dan komunitas hijau. Masjid dan pesantren perlu didorong menjadi pusat pendidikan ekologis berbasis nilai keislaman yang aplikatif, sementara media sosial harus dimanfaatkan sebagai kanal penyebaran dakwah hijau yang efektif dan menjangkau generasi muda. Selain itu, dibutuhkan penelitian lanjutan untuk mengembangkan model-model dakwah ecoteologis yang kontekstual sesuai karakteristik geografis, sosial, dan budaya umat Islam Indonesia, agar paradigma ini benar-benar dapat menjadi arus utama dalam membangun masyarakat beragama yang cinta lingkungan dan berkontribusi aktif terhadap penyelamatan bumi sebagai amanah ilahi.

REFERENCES

- Alfadhli. (2025). Ekoteologi Islam: Menjelajahi Hubungan Spiritual Antara Manusia, Alam, dan Tuhan dalam Tradisi Islam. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 6(1).
- Askar, R. A., & Ghofur, A. (2025). Ekologi dan Hadits: Analisis tentang Peran Manusia sebagai Khalifah di Bumi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2, 231–237.
- Creswell, J. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and A Mixed-Method Approach*. SAGE Publication. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Effendi, M. R. (2025). Eco-Theology: Model Konservasi Hutan Berbasis Nilai-Nilai Agama (Islam) pada Masyarakat Adat Kampung Dukuh. *PERSIS: Scientific Journal of Contemporary Islamic Studies*, 1(1).
- Falah, M. B., & Rohmatuszahroh, A. I. (2024). Menggagas Pertimbangan Childfree: Pendekatan Multidisiplin dan Interdisiplin. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 34–56. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9252>
- Julivadistanto, T., & Gambur, K. M. (2024). Moderasi beragama, katolisisme manggarai dan ekologi integral gereja keuskupan ruteng. *Jurnal Alternatif: Wacana Ilmiah Interkultural*, 13(1).
- Kurniati, N., & Mursalin, H. (2023). Pandangan Islam Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan.

- Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 4(2), 212–220. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v4i2.842>
- Maa, H., & Zainuri, A. I. (2024). *Anthropocentric Views and Their Influence on Environmental Issues BT - Prosiding Seminar Internasional Fakultas Ushuluddin dan Dakwah LAIN Kediri*. 58–65.
- Masduqi, M. (2020). Pendidikan Fikih Lingkungan dalam Membentuk Kesalehan Ekologis. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 94–117.
- Mumtazah, N. (2025). Integration of Science and Qur'anic Education: A Solution to Heal Inner Wounds in the Modern Era. *Spiritus: Religious Studies and Education Journal*, 3(1), 1–11.
- Pohan, Z. R. H., Ramli, R., Anwar, Meriza, I., & Angkat, I. (2023). Konsumerisme dan Meningkatnya Timbunan Sampah di Provinsi Aceh Ditinjau dari Fiqh Al-Bi'ah. *Al Ukhwah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(2), 128–143.
- Putri, D. A., & Azzahra, H. (2025). Tafsir Ekologis: Membaca Ayat-Ayat Alam Sebagai Etika Konservasi dalam Krisis Iklim Global. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(3), 570–584.
- Raziqi, A. (2023). Peran Masjid Sebagai Sentrum Dakwah Maqosid Syariah dan Relasinya dengan Circular Economy. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 1–23.
- Simon, S. (2021). Peranan Pendidikan Agama Kristen Menangani Masalah Ekologi. *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership*, 2(1), 17–35. <https://doi.org/10.47530/edulead.v2i1.60>
- Sugiyono. (2019a). *Buku Sugiyono: Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Vol. 5).
- Sugiyono. (2019b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.